



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru
Telp. (0761) 44341, Fax. (0761) 44342
Kode Pos 28131

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang begitu melimpah serta tiada henti-hentinya terutama limpahan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan “ Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan maksud sebagai upaya menggambarkan hasil akhir dari kegiatan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun kedua dari Rencana Strategi 5 tahunan (2014–2019), sekaligus sebagai pertanggung-jawaban atas Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun.

Dalam LKjIP ini diyakini masih banyak memiliki kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu besar harapan kami kepada semua pembaca kiranya dapat memberikan masukan, kritikan maupun saran yang bersifat membangun, sehingga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun mendatang akan lebih baik dan sempurna.

Pekanbaru, Januari 2018

Pt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630512 199303 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIVE

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Riau yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai. Dari 2 indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018, menunjukkan bahwa 2 indikator tersebut capaian kerjanya dikategorikan sangat tinggi. Capaian angka produksi daging sapi lokal mencapai 102%, kerbau 101% dan kambing 96% dari yang ditargetkan. Sedangkan capaian untuk sasaran Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan realisasinya sebesar 92,7% dari yang ditargetkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

- 1) Usaha untuk meningkatkan populasi ternak masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pelaksanaan inseminasi buatan karena terkendala jumlah Petugas IB yang terbatas dan wilayah pelayanannya yang luas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh lokasi yang membutuhkan pelayanan. Usaha untuk pengembangan usaha perbibitan masih terkendala manajemen kelompok yang belum baik dan pengendalian keluar masuk ternak yang tidak terkendali.
- 2) Usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk belum optimal sehingga kegiatan budidaya peternakan belum memberikan porsi yang besar bagi pendapatan peternak. Hal ini selain disebabkan karena produktifitas peternak yang rendah, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal peternak seperti fluktuasi harga, harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran.
- 3) Sebagian besar kondisi RPH/TPH/TPU serta sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar/syarat sebagai tempat penyelenggara pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang ASUH (halal, aman, sehat dan utuh), hal ini berkaitan dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, serta kurangnya perhatian dan komitmen dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Fungsi dan Tugas	3
D. Keadaan Pegawai	3
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	5
F. Keuangan	6
G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	6
I. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A . Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Instrumen Pendukung.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja 2018.....	15
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya	16
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra	17
D. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	18
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	23
F. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV. PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (orang)	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (orang)	4
Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (orang)	4
Tabel 4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (orang)	4
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (orang)	5
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019	10
Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019	10
Tabel 8. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	11
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018	12
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 11. Kategori Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018	15
Tabel 12. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2015 s/d 2018	16
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target Renstra	17
Tabel 14. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1	23
Tabel 15. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-2	25
Tabel 16. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018.....	26
Tabel 17. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Accountability Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan juga Rencana Strategis tahun 2014-2019. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti Lampiran 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Rumah Sakit Hewan, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner.
7. UPT Inseminasi Buatan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
8. UPT Laboratorium Pakan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak
9. Kelompok Pejabat Fungsional.

C. Fungsi dan Tugas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pengendalian bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran peternakan.
- d. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- e. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.
- g. Penyelenggaraan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan lintas kabupaten/kota.
- h. Pemberdayaan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 226 orang. Data kondisi pegawai disajikan pada Tabel 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (Orang)

NO	URAIAN	ASN	THL	Jumlah
1	Laki-laki	40	156	196
2	Perempuan	44	68	112
Total		84	224	308

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (Orang)

No	Pendidikan	ASN	THL	Jumlah
1	S2	30	13	43
2	S1	25	97	122
3	D II/III	12	15	27
6	SLTA	17	76	93
7	SLTP	0	12	12
8	SD	0	11	11
Total		84	224	308

Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (Orang)

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	23
2	Golongan III	47
3	Golongan II	14
4	Golongan I	0
Total		84

Tabel 4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (Orang)

No	Bidang/UPT	ASN	THL	Jumlah
1	Sekretariat (termasuk kepala dinas dan sekretaris)	21	38	59
2	Bidang Produksi Peternakan	14	10	24
3	Bidang Agribisnis Peternakan	9	7	16
4	Bidang Kesehatan Hewan	6	7	13
5	Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	4	10
6	UPT Inseminasi Buatan Ternak	9	23	32
7	UPT Rumah Sakit Hewan	10	17	27
8	UPT Laboratorium Pakan Ternak	9	43	52
9	Honorer Pendamping Agribisnis		75	
Total		84	224	308

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	0
2	Fungsional Perencana	2
3	Fungsional Medik	2
4	Fungsional Paramedik	3
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	3
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	3
Jumlah		13

E. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki aset mulai dari tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain tersebar di bidang dan UPT. Fasilitas yang tersedia pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Ruang Rapat:
 - a. Ruang Rapat Besar : 1 Unit
 - b. Ruang Rapat kecil : 2 Unit
2. Tempat Upacara dan Apel Pagi dengan ukuran luas 300 m² (30m x 10m)
3. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor:
 - a. Gedung Kantor : 1 Unit, dengan luas : 400 m²
 - b. Gedung Plaza Ternak : 2 Unit, dengan luas : 500 m²
4. Kamar Kecil/Toilet:
 - a. Gedung Dinas : 6 Unit
 - b. Gedung UPT RSH : 4 Unit
 - c. Gedung UPT IBT : 2 unit
 - d. Gedung Laboratorium UPT RSH : 1 unit
 - e. Gedung UPT Laboratorium Pakan : 2 unit
5. Halaman Kantor:
 - a. Gedung Dinas : 300 m²
 - b. Gedung UPT RSH : 400 m²
 - c. Gedung UPT IBT : 200 m²

6. Daya Listrik:
 - a. Gedung kantor : 80 A (53.000 VA)
 - b. Gedung Lab UPT RSH : 1) 100 A (66.000 VA)
2) 80 A (53.000 VA)
 - c. Gedung UPT RSH : 50 A (33.000 VA)
 - d. Gedung UPT IBT : 60 A (41.500 VA)
7. Jaringan Telepon Kabel :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit (no tlp: 0761 - 43441 dan 43442)
 - b. Gedung UPT RSH : 1 Unit (no tlp: 0761 – 24170)
8. Jaringan/Layanan Internet :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit
 - b. Gedung UPT RSH : 1 Unit
9. Kendaraan Dinas
 - a. Mobil Jabatan : 5 unit
 - b. Mobil Operasional : 11 unit
 - c. Roda 2 : 27 unit
 - d. Roda 3 : 3 unit

F. Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Riau. Melalui APBD Provinsi Riau dialokasikan berupa belanja langsung sebesar Rp 80.292.494.800,-

Anggaran Pembangunan dari APBN yang tersedia mendukung program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dan pada TA. 2018 terdapat satu Satker berupa Tugas Pembantuan. Jumlah anggaran dikelola sebesar Rp 6.015.916.000,-.

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang berupa:

1. Ketersediaan infrastruktur peternakan yang masih terbatas khususnya puskesmas dan pelayanan Inseminasi Buatan. Keterbatasan infrastuktur ini menyebabkan pelayanan menjadi belum optimal.
2. Kontribusi sektor peternakan terhadap peningkatan pendapatan peternak belum maksimal

3. Kapasitas SDM (aparatur, peternak, dan pelaku usaha) belum memadai
4. Penguasaan teknologi peternakan masih rendah
5. Daya saing, produk olahan peternakan serta pemasaran masih terbatas
6. Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas
7. Pemanfaatan Sumber Daya lahan belum optimal. Pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan ternak masih sangat besar. Peluang pengembangan sapi dan kerbau masih cukup tinggi sebesar 82,14% atau 913.559 ekor.

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran organisasi, aspek strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, serta struktur organisasi;
- Bab II** Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 meliputi RPJMD Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- Bab III** Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dikaitkan dengan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014-2019 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengandung tujuan, sasaran, serta memuat strategi, arah kebijakan dan program disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Populasi ternak ruminansia yang masih sedikit
2. Mahalnya agroinput
3. Kemampuan permodalan peternak terbatas
4. Penerapan teknologi terbatas
5. Daya saing produk masih rendah
6. Lemahnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil peternakan.
7. Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
8. Penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMS)
9. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
10. Adanya ancaman penyakit hewan menular (AI/flu burung, Rabies, SE).

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 7 Kepala Daerah yakni pada misi Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan **Memperkuat pembangunan peternakan dan kesehatan hewan**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Sasaran Program (Outcome) sebagai berikut :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (ton)
		Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Pengembangan kawasan peternakan berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	Pengembangan sistem integrasi tanaman dan ternak
		Optimalisasi pemanfaatan cadangan bio-massa pakan ternak	Pengembangan pengolahan pakan ternak
		Optimalisasi produktivitas ternak	Pengembangan Inseminasi Buatan
		Optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan non-pemerintah	Pengembangan asuransi ternak
	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
		Pengamanan terhadap ancaman penyakit <i>infectious emerging</i> pada manusia dan hewan	Penerapan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berbasis <i>one health</i> .
		Restrukturisasi kelembagaan pelayanan kesehatan di wilayah potensial	Peningkatan fungsi puskesmas

3. Program

Rencana program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif revisi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2014-2019) yang sudah direvisi disusun berdasarkan evaluasi tahun 2014-2016 serta rencana tahun 2017-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 8. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah pemotongan ternak ruminansia lokal (ekor)
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak (%)
3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)

Beberapa pengertian indikator yang perlu diperjelas adalah :

1. Jumlah pemotongan ternak ruminansia lokal adalah jumlah ternak lokal yang dipotong di Provinsi Riau.
2. Angka kematian ternak adalah angka kematian ternak yang diperoleh dari analisis aplikasi ISIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)
3. Populasi Ternak Sapi adalah jumlah populasi ternak akhir tahun yang telah divalidasi.
4. Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran merupakan kelompok peternakan yang memperoleh pendampingan dan peningkatan usaha sehingga dapat menjual produknya.

B. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2018 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 9. berikut ini:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg) - Sapi - Kerbau - Kambing	5.353.615 1.336.903 794.883
2	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	234

C. Instrumen Pendukung

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah perangkat teknologi untuk mengantarkan informasi tersebut, yaitu teknologi informasi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk

mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat petani dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan pertanian. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan peternakan di Riau. Disamping itu, kehadiran web ini adalah untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggungjawab, responsive, efektif, dan efisien dalam mendukung terwujudnya Riau Go IT.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 dengan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2018	% CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)				
		Sapi	5.353.615	5.458.589	102%	Sangat Tinggi
		Kerbau	1.336.903	1.377.287	101%	Sangat Tinggi
		Kambing	794.883	762,453	96%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	234	251	92,7%	Sangat Tinggi

Dari data capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 untuk sasaran strategis ke-1: Meningkatkan Produksi Daging Ruminansia dengan indikator Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal terlihat bahwa kinerjanya dikategorikan pada kategori sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan. Target produksi daging sapi lokal pada tahun 2018 sebesar 5.353.615 kg, dengan realisasi produksi 5.458.589 kg dengan tingkat capaian 102%. Target produksi daging kerbau lokal pada tahun 2018 adalah sebesar 1.336.903 dengan realisasi produksi sebesar

1.377.287 kg dengan tingkat capaian 102%. Sedangkan untuk produksi daging kambing lokal, target 794.883 kg, realisasi 762,453 kg dengan tingkat capaian 96%. Angka ini masih dapat berubah karena data yang ada merupakan data sementara. Selanjutnya akan dilakukan validasi dengan petugas di daerah pada bulan Maret 2019.

Pada Sasaran ke-2 yakni Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan indikator jumlah kasus veteriner pada manusia juga menunjukkan kategori capaian yang sangat tinggi dengan capaian 92,7%. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target untuk menurunkan kasus veteriner pada manusia hingga dibawah 234 kasus dimana selama tahun 2018 kasus veteriner pada manusia mencapai 251 kasus.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi tahun 2018 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 12. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2015-2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	% RATA-RATA PENINGKATAN /PENURUNAN
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)					
		Sapi	NA	NA	NA	5.458.589	-
		Kerbau	NA	NA	NA	1.377.287	-
		Kambing	NA	NA	NA	762,453	-
2	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	448	549	510	251	-17,7%

Dari Tabel 12 terlihat bahwa capaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya produksi daging ruminansia dengan indikator angka produksi daging ruminansia

lokal tahun 2015-2017 belum dapat diukur karena data yang belum tersedia. Selama ini data yang tersedia berupa data produksi daging secara keseluruhan baik daging dari ruminansia lokal ataupun daging yang berasal dari luar Provinsi Riau. Dengan adanya perubahan renstra dan untuk lebih dapat mengetahui sampai sejauhmana peran OPD dalam meningkatkan produksi daging, maka indikator pada renstra mengalami perubahan menjadi produksi daging ruminansia lokal. Pada sasaran strategis yang ke dua yakni Meningkatnya Keamanan Masyarakat Dari Ancaman Penyakit Hewan dapat dilihat bahwa jumlah kasus veteriner pada manusia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami kecendrungan menurun. Rata-rata jumlah kasus veteriner pada manusia mengalami penurunan 17,7% setiap tahunnya. Hal ini dapat diaggap sebagai suatu keberhasilan dari kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam hal menurunkan jumlah kasus veteriner yang terjadi pada manusia.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra

Selanjutnya dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2018 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN HINGGA 2018	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN 2019	CAPAIAN TERHADAP 2019
1	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Angka produksi daging ruminansia lokal (kg)			
		Sapi	5.458.589	5.460.676	99,96%
		Kerbau	1.377.287	1.363.623	101%
		Kambing	762,453	806.806	94,5%
2	Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan	Jumlah kasus veteriner pada manusia (orang)	251	211	81%

Dari Tabel 13 dapat diketahui bahwa capaian terhadap renstra dalam kategori tinggi terutama untuk indikator produksi daging ruminansia lokal. Namun tingginya capaian produksi ruminansia lokal sebenarnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daging di Riau. Pemenuhan kebutuhan daging di Riau masih didatangkan dari daerah lain.

Penentuan target produksi ruminansia lokal berdasarkan potensial stok yang dihitung dari jumlah populasi ternak ruminansia yang dibudidayakan di Provinsi Riau. Penentuan target yang rendah menyebabkan target capaian mudah untuk dipenuhi. Namun tidak dapat dipungkiri, capaian produksi daging ruminansia lokal yang hampir mencapai target padahal masih ada satu tahun lagi untuk menacapainya menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di Provinsi Riau terutama dalam peningkatan produksi daging sudah berjalan dengan baik.

Capaian terhadap renstra pada sasaran strategis yang ke dua yakni Meningkatnya keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan indikator jumlah kasus veteriner pada manusia telah mencapai 81% dan masih tersisa waktu hingga akhir 2019 untuk mencapai target 100%.

D. Analisis Peningkatan/Penurunan kinerja dan Alternatif Solusi

a. Permasalahan

Dalam memperkuat pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan sasaran peningkatan produksi daging ruminansia dan peningkatan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah:

1. Lambannya peningkatan produksi dan produktifitas ternak

Perkembangan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama 5 (lima) tahun terakhir sangat lamban. Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal. Kualitas bibit ternak menunjukkan gejala penurunan, yang disebabkan oleh seleksi dan penyingkiran (culling) ternak belum dilaksanakan secara efektif dan para peternak lebih memilih menjual ternak yang berkualitas terbaik karena harganya lebih tinggi.

2. Ketersediaan pakan ternak yang masih terbatas.

Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Meskipun sumberdaya

alam Provinsi Riau sangat melimpah, tidak menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu lumbung pakan ternak. Seharusnya dengan potensi tersebut Provinsi Riau mampu mengambil peran terutama dalam penyediaan pakan dalam negeri. Namun pada kenyataannya, eksplorasi dan pemberdayaan bahan baku pakan dan pakan asal lokal belum menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak bagi peternakan khususnya di Provinsi Riau dan di Indonesia pada umumnya.

3. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak, hal ini dibuktikan sebagian besar bahan baku pakan baik utama maupun penunjang masih dipenuhi oleh bahan baku impor. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
4. Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis). Penyakit hewan sudah menjadi bagian keseharian yang sangat penting yang menentukan keberhasilan peningkatan produksi ternak itu sendiri. Secara cermat penyakit ternak sangat bervariasi dari satu jenis ternak dengan jenis ternak lainnya dan dapat ditularkan dari satu ternak ke ternak lainnya atau jenis lainnya. Penyakit pada ternak sendiri, tidak dapat diprediksi secara tepat kapan, dimana dan oleh apa pemicunya. Hal ini sangat dinamis dan banyak dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal ternak atau hewan itu sendiri. Faktor internal munculnya penyakit adalah kurangnya daya tahan tubuh ternak yang sebagian besar dipicu oleh kurangnya asupan pakan yang bergizi, kebersihan tubuh ternak yang kurang memadai, penularan penyakit oleh ternak lainnya. Faktor eksternal yang sering mempengaruhi adalah kondisi geografis dan iklim di Indonesia yang sangat variatif. Provinsi Riau dengan tingkat perubahan cuaca dan kelembabannya yang tinggi banyak mempengaruhi kondisi ternak dimana seperti pada musim hujan, maka potensi terjadinya serangan wabah penyakit sangat besar. Penyebaran

penyakit menjadi sangat cepat karena didukung oleh kondisi alam seperti banjir, angin dan cuaca lainnya.

5. Harga dan biaya obat-obatan ternak yang sulit dijangkau oleh peternak.
Ketersediaan obat dan vaksin penyakit ternak yang masih banyak dipenuhi dari luar negeri menjadikan biaya dan harga obat-obatan ternak menjadi mahal. Kapasitas produksi obat hewan dalam negeri yang belum mencukupi pasar lokal serta distribusi obat hewan yang belum merata menjadikan penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan belum dapat seutuhnya ditangani dan dikendalikan. Selain itu, keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan hewan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan manajemen pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Bila terjadi wabah penyakit yang menyebabkan tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga produksi ternak menurun secara drastis, maka yang mengalami kerugian secara ekonomi tidak hanya peternak besar namun peternak kecil juga merasakan dampak dari kerugian skala nasional tersebut.
6. Pengolahan pangan asal hewan skala besar banyak dikuasai oleh hanya sekelompok kalangan tertentu dan berbanding terbalik dengan kondisi industri pengolahan pangan asal hewan skala kecil. Pengusaha skala besar memiliki sumberdaya yang sangat memadai dengan ditunjang oleh sumberdaya manusia yang kompeten dalam melakukan proses produksi pengolahan bahan pangan asal hewan. Namun sebaliknya usaha skala kecil memiliki keterbatasan baik dalam aspek manajemen pengolahan, pembiayaan, sumberdaya manusia dan sarana. mereka melakukan kegiatan pengolahan hanya dengan menggunakan sarana terbatas.
7. Lemahnya pengelolaan rantai distribusi pasar pangan asal hewan pada usaha skala kecil. Rantai distribusi bahan pangan asal hewan menjadi salah satu penentu aspek ekonomi yang kritis. Dimana kenaikan harga bahan pangan asal hewan bisa terjadi karena rantai distribusi yang panjang. Banyaknya berbagai pihak yang terlibat dalam rantai tersebut menyebabkan biaya (cost) yang dikeluarkan dalam rangka mencapai konsumen semakin besar. Pihak yang sangat diuntungkan dalam hal ini adalah usaha-usaha

yang dapat mengelola rantai pasar tersebut baik dari hulu maupun sampai hilir secara mandiri. Mereka mengelola rantai pasar pangan asal hewan dengan manajemen mandiri yang dapat memperkecil biaya distribusi yang dikeluarkan. Sebaliknya usaha-usaha kecil hanya mengandalkan modal dasar dan distribusi sepenuhnya dikendalikan oleh pihak ketiga atau pihak lain yang berpotensi menyebabkan terjadi kenaikan harga pangan asal hewan karena masing-masing pihak yang terlibat mengambil untung yang sebesar-besarnya. Hal ini, berdampak kenaikan bahan pangan asal hewan ditingkat konsumen menjadi sangat tinggi.

b. Solusi

1. Perlu pembinaan yang lebih intensif kepada peternak serta sosialisasi dan advokasi diseluruh peternak lokal dengan regulasi dan pedoman teknis *good farming practices* (cara beternak yang baik) serta didukung oleh edukasi dan ketersediaan teknologi baik informasi dan sarana pengolahan bahan baku pakan yang mudah, terjangkau dan modern.
2. Migrasi ternak dari satu daerah ke daerah yang lain harus menjadi perhatian pada setiap pintu-pintu masuk (*entry point*) agar penyebaran penyakit dapat dikendalikan. Pemasukan dan perdagangan ternak dari saat daerah ke daerah lain harus memperhatikan aspek tersebut sehingga potensi penularan dapat diminimalkan. Maraknya kebijakan importasi ternak maupun hasil ternak menjadi salah satu alternatif masuk penyakit hewan ke dalam wilayah Indonesia, apabila tidak menggunakan kaidah pengkajian atas risiko apa saja yang terjadi bila dilakukan importasi tersebut, maka potensi penularan penyakit dari luar kedalam wilayah Indonesia sangat besar. Perlu aspek kehati-hatian dalam mengambil pilihan dan kebijakan dalam melakukan importasi ternak maupun bahan pangan asal ternak.
3. Perlu regulasi dan kebijakan yang tegas agar dapat menyelamatkan usaha kecil menengah bidang peternakan agar dapat bergerak maju dan eksis sesuai tuntutan perubahan dan zaman.
4. Penguatan organisasi/lembaga kesehatan hewan dan sumberdaya manusia yang memadai ditingkat daerah dengan didukung oleh regulasi, komitmen

dan kebijakan yang strategis pada tiap daerah dan wilayah dalam rangka melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit pada ternak.

5. Untuk peningkatan produksi, produktifitas dan populasi ternak, langkah yang dapat dilakukan diantaranya :
 - Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan serta melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan.
 - Program penjarangan dan penyelamatan betina produktif.
 - Penanganan gangguan reproduksi, penyakit reproduksi dan kasus kesehatan hewan lainnya.
 - Perbaikan kawin alam melalui distribusi pejantan unggul dan sertifikasi pejantan pemacek.
 - Pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal dan pusat pelatihan pakan
 - Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan
 - Penyediaan dan penyebaran induk/bibit ternak, bibit HPT
6. Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan local dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair (*biofertilizer*) dengan mengembangkan pada kawasan peternakan yang sudah ditetapkan dalam masterplan pembangunan peternakan Provinsi Riau.
7. Peningkatan kualitas petugas yang berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar atau pertemuan teknis baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Produksi Daging Ruminansia

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapai target peningkatan produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
I	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia Lokal (ekor)	26.651	28.228	106%
1	Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan (SMD)	Jumlah lembaga (kelompok) agribisnis peternakan yang dikembangkan oleh SMD (kelompok)	16	16	100,00
2	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Unit pengolahan limbah ternak (unit)	23	0	0
II	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi	273.308	250.208	91,5%
1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana UPT. Pembibitan Ternak yang diadakan (unit)	86	39	45,35
2	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	Jumlah bibit ternak yang dipelihara (ekor)	200	269	134,50
3	Pengembangan Agribisnis Pertenakan	Jumlah ternak sapi model integrasi (ekor)	870	870	100,00
4	Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah straw yang diproduksi (dosis)	20.000	20.071	100,35
5	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah kebuntingan ternak hasil IB (ekor)	23.000	23.000	100,00
6	Pengembangan budidaya ternak ruminansia	Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani peternakan	30	30	100,00
7	Pendistribusian Ternak Kerbau	Jumlah ternak kerbau (ekor)	70	70	100,00
8	Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	Jumlah bibit BPT yang dihasilkan (batang)	500.000	420.000	84,00
9	Pengembangan Kawasan Pertenakan	Pengembangan SPR yang dibina (SPR)	3	3	100,00
10	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertenakan	Jumlah sarana dan prasarana IB yang disediakan (unit)	9.000	9.000	100,00
11	Pendistribusian Ternak Kambing	Jumlah ternak kambing (ekor)	1.170	1.020	87,18
12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertenakan Iseminasi Buatan	Jumlah sarana dan prasarana UPT IB yang disediakan (unit)	50	23	46,00
13	Penguatan Pembibitan Ternak	Jumlah kelompok yang melaksanakan GBP (kelompok)	6	4	66,67
14	Pengembangan Pakan	jumlah pakan yang Revitalisasi (unit)	5	2	40,00
15	Pendistribusian Ternak Sapi kepada Masyarakat	Jumlah Ternak Sapi yang didistribusikan (Ekor)	1.770	465	26,27

Dari Tabel 14 terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging ruminansia lokal maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Kawin Alam ataupun yang berasal dari Inseminasi Buatan. Capaian sasaran strategis angka produksi daging ruminansia lokal yang mencapai 102% dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan produksi daging terutama daging ruminansia lokal. Diantara kegiatan yang memberikan pengaruh besar diantaranya adalah Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak yang realisasi kegiatannya melebihi target yakni 134,5%, Kegiatan Inseminasi Buatan dengan capaian 100%, Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan capaian 100%, kegiatan Pengembangan Produksi Semen Beku dengan capaian 100%, kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia dengan capaian 100%, Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak dengan realisasi 84%, Kegiatan Pendistribusian Ternak Kambing dengan realisasi capaian 87,18%, dan Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan dengan realisasi mencapai 100%.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Keamanan Masyarakat dari Ancaman Penyakit Hewan

Peningkatan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan dengan indikator jumlah kasus veteriner pada manusia diwujudkan dengan melaksanakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapai target penurunan kasus veteriner pada manusia pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-2

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi i Capaia	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit	Persentase angka kematian ternak	5%	2,3%	154%
2	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular	Jumlah penanganan kesehatan ternak (ekor)	7.500	7.500	100,00
3	Pengadaan Obat Hewan	Jumlah obat hewan dan vaksin (dosis)	65.000	65.000	100,00
4	Penanggulangan Rabies dan SE	Jumlah penanganan kasus dan SE (kasus)	32	32	100,00
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan kualitasnya	70	68	97,14
7	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Klinik)	Jumlah hewan yang ditangani aktif dan pasif produk asal	1.100	3.806	346,00
8	Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi	Jumlah spesimen hewan dan sampel produk asal hewan	20.000	78.762	393,81
9	Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Jumlah penanganan kasus gangguan reproduksi (kasus)	1.000	1.171	117,10
10	Pengawasan Peredaran Produk Pangan Asal Hewan dan Non	Jumlah unit usaha yang diawasi penerapan penjaminan produk	30	30	100,00
11	Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis	jumlah unit usaha yang diawasi dari aspek kesrawan dan	3.700	2.219	59,97
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Jumlah kelompok yang mendapatkan akses	40	40	100%
2	Peningkatan Pelayanan UPT Plaza Ternak	Jumlah sarana dan prasarana (unit)	23	20	86,96
3	Pembinaan Manajemen dan Kemitraan Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi (orang)	24	24	100,00
4	Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha yang melakukan kemitraan (orang)	50	50	100,00
5	Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Hygiene Sanitasi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi ke lembaga	40	40	100,00
6		Penerapan penjaminan produk hewan yang asuh (unit usaha)	30	30	100,00

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan, pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit serta Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan berjalan dengan baik dan lancar. Target angka kematian ternak tahun 2018 sebesar 5% dapat ditekan kematian ternaknya menjadi 2,3% sehingga realisasi capaian kinerja untuk indicator sasaran Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan adalah sebesar 154%. Kegiatan yang mendukung upaya penurunan angka kematian ternak diantaranya adalah Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan Pengadaan obat Hewan dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan Penanggulangan Rabies dan SE dengan capaian kinerja 100%, Kegiatan pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dengan capaian melebihi target

sebesar 346%, Kegiatan Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dengan capaian kinerja melebihi target sebesar 393,81%, Kegiatan Penanggulangan Gangguan Penyakit Reproduksi Asal Hewan dengan capaian 117%. Dengan capaian kegiatan-kegiatan kinerja yang dilaksanakan dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan maka tahun 2018 Jumlah kasus veteriner dapat dikurangi menjadi 251 kasus yang sebelumnya tahun 2017 kasus veteriner pada manusia 501 kasus.

F. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2018 memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 80.292.494.800,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp.40.075.531.918,- atau sebesar 49,91 %. dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018

PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
A	UTAMA	76.435.757.412	37.187.325.307	48,65%
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.426.219.000	73.676.300	5,17%
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	65.157.276.300	29.840.450.675	45,80%
3	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	8.720.990.112	6.536.546.112	75,95%
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	1.131.272.000	736.652.220	65,12%
B	PENUNJANG	3.856.737.388	2.888.206.611	74,89%
	TOTAL (A+B)	80.292.494.800	40.075.531.918	49,91%

Dari anggaran yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat bahwa program yang paling besar anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sebesar Rp 65.157.276.300 dengan serapan anggaran 45,80%. Untuk serapan anggaran terbesar adalah Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Ternak dengan anggaran Rp 8.720.990.112,- dan serapan 75,95%. Sementara serapan anggaran paling kecil pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan serapan hanya 5,17%.

Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 17. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	TARGET			REALISASI		
			(Rp 000)	FISIK (%)	KEU (Rp 000)	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (Rp)	KEU (%)
1	Pemenuhan Pangan Asal Ternak Dan Agribisnis Peternakan Rakyat								
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	50 sampel	32.400	100	32.400	100	100	32.235	99,49%
2	Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan	60.000 dosis	1.370.410	100	1.370.410	100	100	1.340.994.924	97,85%
3	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	26.500 akseptor	3.590.856	100	3.590.856	100	100	3.570.690.908	99,44%
		40 ekor	520.000	100	520.000	100	100	516.809.000	87,47
4	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	100 sertifikat	125.700	100	125.700	100	100	125.646.000	99,96%
		3 lokasi	209.850	100	209.850	100	100	204.847.400	97,62%
5	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	2 layanan	142.900	100	142.900	100	100	135.924.000	95,12%
6	Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternakj	1 Dokumen	24.000	100	24.000	100	100	22.972.000	95,72%
Jumlah			6.015.916.000	100	6.015.916.000	100	100%	5.948.508.152	98,88%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam merealisasikan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan kegiatan dengan realisasi Fisik adalah sebesar 87,39% Sementara itu, untuk realisasi keuangan adalah sebesar 56,76%.

Hasil evaluasi telah menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membangun usaha tani ternak cukup besar dan hal ini telah didukung oleh tersedianya peluang potensi pembangunan peternakan yang cukup baik, serta potensi pemasaran yang strategis. Oleh karena itu diharapkan ke depan para pengambil keputusan hendaknya dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik lagi dalam pengalokasian sumber dana pembangunan Peternakan di Provinsi Riau.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2014 - 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian

masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengadaan ternak besar dan proses administrasi pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat menjadi keniscayaan dimasa yang akan datang.